

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2: Telepon (022) 4235026

Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id

Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: Kep.1614/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang: a. bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organsiasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
 - Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang

: Surat Kepala Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Nomor: 19251/KPG.01/Kepegumas tanggal 20 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama melaksanakan tugas;

KEDUA

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

KETIGA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM Pembina Utama Madya

Tembusan:

- 1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.



PANGKAT/ PENDIDIKAN KELAS NO NAMA NIP JABATAN LAMA **UNIT KERJA LAMA** JABATAN BARU **UNIT KERJA BARU** GOL.RUANG TERAKHIR **JABATAN** Pengatur SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN TUGIMIN 196612292008011003 32 SLTA 5 PENGADMINISTRASIUMUM PENGADMINISTRASI UMUM TK.I (II/d) KEHUMASAN, SEKRETARIAT KEHUMASAN, SEKRETARIAT Pengatur PENGADMINISTRASI SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN 33 LILI ROHAELI 196501262007011002 SLTA 5 PENGADMINISTRASI UMUM TK.I (II/d) **UMUM** KEHUMASAN, SEKRETARIAT KEHUMASAN, SEKRETARIAT Pengatur PENGADMINISTRASI SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN 34 SAPRUDIN 197306242008011003 SLTA 5 PENGADMINISTRASI UMUM TK.I (II/d) UMUM KEHUMASAN, SEKRETARIAT KEHUMASAN, SEKRETARIAT Pengatur PENGADMINISTRASI SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN 35 KARMAN 196708022008011005 SLTA PENGADMINISTRASI UMUM TK.I (II/d) **UMUM** KEHUMASAN, SEKRETARIAT KEHUMASAN, SEKRETARIAT Penata PENGADMINISTRASI SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN 36 AGUS AMIR 197108011992031004 Muda TK.I SLTA PENGADMINISTRASI UMUM KEUANGAN KEHUMASAN, SEKRETARIAT KEHUMASAN, SEKRETARIAT (III/b) Penata PENGADMINISTRASI SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN 37 DIAN NIURANI 196408171985032012 Muda TK.I SLTA 5 PENGADMINISTRASI UMUM KEUANGAN KEHUMASAN, SEKRETARIAT KEHUMASAN, SEKRETARIAT (III/b) Penata **PENGADMINISTRASI** SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN 38 EUIS HARYATI 196611061990032004 Muda TK.I SLTA 5 PENGADMINISTRASI UMUM UMUM KEHUMASAN, SEKRETARIAT KEHUMASAN, SEKRETARIAT (III/b) Pengatur PENGADMINISTRASI SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN WAWAN 39 196502142008011001 Muda TK.I SLTP 5 PENGADMINISTRASI UMUM **UMUM** KEHUMASAN, SEKRETARIAT KEHUMASAN, SEKRETARIAT (II/b) Pengatur **PENGADMINISTRASI** SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN 40 HERI HERMAWAN 198104082008011003 SLTA PENGADMINISTRASI UMUM TK.1 (II/d) UMUM KEHUMASAN, SEKRETARIAT KEHUMASAN, SEKRETARIAT Pengatur PENGADMINISTRASI SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN 41 DADANG FENDI 19730608200801100 SLTA PENGADMINISTRASI UMUM TK.I (II/d) UMUM KEHUMASAN, SEKRETARIAT KEHUMASAN, SEKRETARIAT Pengatur **PENGADMINISTRASI** SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN CECEP IMAN SUJANA 197504292014121001 SLTP PENGADMINISTRASI UMUM Muda (II/a) KEHUMASAN, SEKRETARIAT MUMU KEHUMASAN, SEKRETARIAT Pengatur **PENGADMINISTRASI** SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN 43 SUHARTINI 196406081984032004 PENGADMINISTRASI UMUM Muda (II/a) UMUM KEHUMASAN, SEKRETARIAT KEHUMASAN, SEKRETARIAT Pengatur PENGADMINISTRASI SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN DADANG KOSWARA 196909132007011005 SLTA PENGADMINISTRASI UMUM TK.I (II/d) UMUM KEHUMASAN, SEKRETARIAT KEHUMASAN, SEKRETARIAT RIYAN HIDAYAT, Penata ANALIS DATA DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN 45 199003012020121009 S1 ANALIS SISTEM INFORMASI S.Kom Muda (III/a) **INFORMASI** KEHUMASAN, SEKRETARIAT KEHUMASAN, SEKRETARIAT USEP Penata TK.I ANALIS SISTEM SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN ROHMANUDDIN. 196704121991031009 51 ANALIS SISTEM INFORMASI (III/d) **INFORMASI** KEHUMASAN, SEKRETARIAT KEHUMASAN, SEKRETARIAT S.Sos PENYULUH KESEHATAN MOCH, DEDEN ILYAS Penata SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN PENYUSUN KEBUTUHAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN 199405102020121007 7 51 DAN KESELAMATAN SULAIMAN, S.E. Muda (III/a) KEHUMASAN, SEKRETARIAT BARANG INVENTARIS KEHUMASAN, SEKRETARIAT KERJA Penata **PENGADMINISTRASI** SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM, DAN NIA KURNIASARI 196405171985032008 Muda TK I SLTA 5 PENGADMINISTRASI UMUM KEUANGAN KEHUMASAN, SEKRETARIAT KEHUMASAN, SEKRETARIAT (III/b)



364	363	362	361	360	359	N O
RISKA SEPTIANA, S.Kom	RINI EKAWATI	EGI ADI PERDANA, A.Md	IRWAN RAHMAN, S.M.	TETI SUMARNI, S.E.	ABDUL ROHMAN	NAMA
199109272020122019	198112082010012005	198911142020121006	198309022010011010	197111022009012001	198301282010011005	Nip
Penata Muda (III/a)	Penata Muda TK.I (III/b)	Pengatur (II/c)	Penata Muda (III/a)	Penata Muda (III/a)	Penata Muda (III/a)	PANGKAT/ GOL.RUANG
S1	Si	D3	51	S1	S	PENDIDIKAN TERAKHIR
7	7	o	o	o)	o	KELAS JABATAN
ANALIS SISTEM INFORMASI	ANALIS DATA DAN PELAPORAN	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	PENGADMINISTRASI	PENGOLAH DATA	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	JABATAN LAMA
SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMENRUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANGMUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUSRUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANGKULON SUKABUMI	UNIT KERJA LAMA
ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN	ANALIS DATA DAN PELAPORAN	PENGELOLA DATA	PENGOLAH DATA	PENGOLAH DATA	PENGOLAH DATA	JABATAN BARU
SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS. BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS, BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS,BIDANG MUTU DAN AKREDITASI, UPTDKHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAHJAMPANG KULON SUKABUMI	UNIT KERJA BARU

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 31 Januari 2022

an. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara elektronik olah: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM Pembina Utama Madya

